

## DISKURSUS KEDAULATAN PANGAN PADA ORGANISASI PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Yeby Ma'asan Mayrudin, Bayu Nurrohman, Renata Maharani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[yeby@untirta.ac.id](mailto:yeby@untirta.ac.id), [bayu.nurrohman@untirta.ac.id](mailto:bayu.nurrohman@untirta.ac.id), [renatamaharani.01@gmail.com](mailto:renatamaharani.01@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini memeriksa tentang bagaimana partai-partai politik dalam mengejawantahkan mengenai diskursus kedaulatan pangan. Riset ini penting untuk dilakukan karena melihat Indonesia dengan segala potensi pangan yang dimiliki, namun masih banyak permasalahan pangan yang dihadapi. Permasalahan pangan memang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Maka perlu langkah kolaborasi dengan berbagai pihak yang punya peran strategis terhadap masyarakat salah satunya adalah partai politik. Maka riset ini akan memotret bagaimana peran partai politik dalam mendukung upaya negara untuk mencapai ketahanan pangan. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersandar pada dokumen tertulis seperti dokumen resmi partai (AD/ART), dan dokumen lain yang mendukung seperti pemberitaan di media massa daring. Hasil penelusuran dan analisa menggambarkan bahwa hanya beberapa partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mencantumkan program pangan dalam AD/ART Partai. Meski di dalam AD/ART telah dijabarkan dalam berbagai program-program partai yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Namun masih perlu peningkatan upaya yang lebih massif dan terstruktur ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan sehingga Partai Politik bisa lebih menunjukkan *political will* secara tegas menyelenggarakan program di tempat yang membutuhkan bantuan penguatan pangan.

**Kata Kunci:** Partai politik; Ketahanan Pangan; Kedaulatan Pangan

### PENDAHULUAN

Kerawanan pangan kerap menjadi tragedi bagi kelangsungan makhluk hidup dari dulu hingga di masa pandemi Covid-19 ini (Arndt et al., 2020; Farcas et al., 2021; Mishra & Rampal, 2020; Nchanji & Lutomia, 2021; Zurayk, 2020). Rilis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut tingkat kelaparan dan kekurangan gizi dunia meningkat tajam selama pandemi Covid-19 (Mishra & Rampal, 2020; Zurayk, 2020). Jumlah orang yang kekurangan gizi meningkat menjadi sekitar 768 juta dibanding tahun 2020 atau setara dengan

10 persen dari populasi dunia (Tempo.co, 2021a). Berikut di bawah ini data sebaran Angka kekurangan gizi berbasis pada wilayah.

Tabel 1. Angka Kekurangan Gizi Berdasar Benua

No	Benua	Angka Kekurangan Gizi
1	Asia	418 juta orang
2	Afrika	282 juta orang
3	Amerika Latin dan Karibia	60 juta orang

Sumber: Tempo.co (2021)

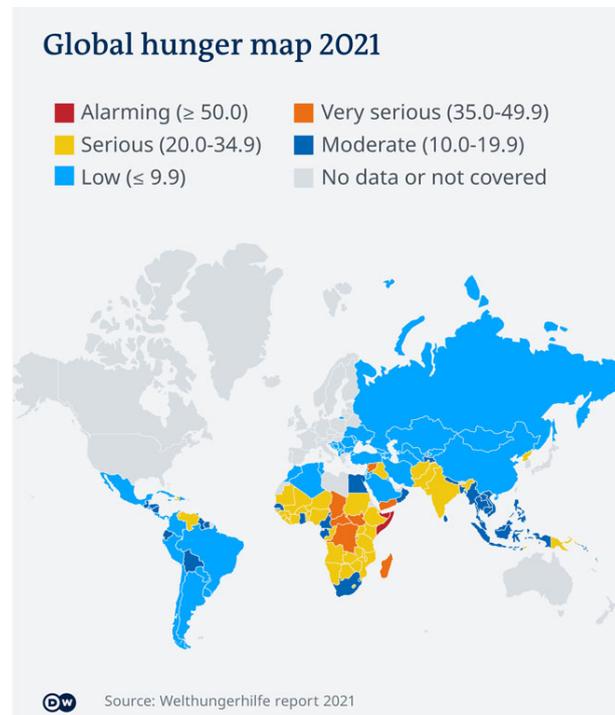
Data di atas justru menunjukkan bahwa angka tertinggi kekurangan gizi bukan pada penduduk Afrika, melainkan penduduk Asia. Penduduk Asia Selatan menyumbang angka terbesar disusul Asia Tenggara kemudian Asia Barat (Arbar, 2021). Jika angka kekurangan gizi terbilang tinggi berdasar pada data tersebut, apalagi fenomena kelaparan di dunia sepertinya melebihi angka warga kekurangan gizi. Laporan Indeks Kelaparan Global (*Global Hunger Index* atau GHI) 2021 mengungkap sekitar 50 negara di dunia menghadapi tingkat kelaparan serius. Tahun 2020 sekitar 2,4 miliar orang dilaporkan kehilangan akses terhadap makanan bergizi. Artinya sebagian besar penduduk mengalami kelaparan (Ghaedi, 2021; Harahap, 2021; Tempo.co, 2021b).

Apabila mengacu pada rilis Departemen Pertanian Amerika Serikat yang menaksir bahwa kelaparan global akan terjadi pelonjakan yang signifikan. Negara-negara seperti Yaman, Kongo, Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia disebut akan menghadapi peningkatan jumlah orang yang tidak memiliki cukup makanan (Arbar, 2021; Lestari, 2021). Bersandar pada paparan David Beasley sebagai Kepala *World Food Programme* (WFP) menegaskan bahwa 41 juta orang berisiko mati kelaparan (Tempo.co, 2021a).

Indikasi penyebab terjadinya kerawanan pangan akhir-akhir ini disinyalir akibat perubahan iklim yang berkorelasi dengan pemanasan global seperti badai, banjir, dan kekeringan. Lalu “lingkaran setan” kelaparan diakibatkan kerap muncul konflik kekerasan. Selanjutnya kondisi kerawanan diperparah dengan fenomena pandemi Covid-19 yang merajalela di setiap negara (Ghaedi, 2021; Harahap, 2021; Tempo.co, 2021b). Adapun (Molotoks, Smith, & Dawson, 2021) menyebut krisis pangan disebabkan karena perubahan

iklim, penambahan populasi makhluk hidup, dan konversi lahan pertanian ke sektor lain. Berikut di bawah ini gambar peta kelaparan global tahun 2021:

Gambar 1. Peta Kelaparan Global 2021



Sumber: Welthungerhilfe, 2021 dalam (Ghaedi, 2021; Harahap, 2021)

Dalam peta tersebut menunjukkan bahwa negara Somalia masuk dalam kategori “*alarming*” soal kelaparan. Selanjutnya negara dengan kategori “*very serious*” di antaranya adalah Yaman, Madagaskar, Sudan, Syiria, dan lain sebagainya. Lalu kategori “*serious*” ialah Myanmar, India, Pakistan, Korea Utara, dan lain sebagainya. Adapun Indonesia masuk dalam kategori “*moderate*” yang artinya masih tergolong relatif krusial belum pada titik aman. Lihat saja ranking Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index*) 2020 turun dari posisi 62 ke posisi 65 dari total 113 negara. Dengan peringkat seperti itu menunjukkan bahwa seyogyanya diperlukan usaha keras untuk mencapai ketahanan atau kedaulatan pangan (Hadyan, 2021). Ditambah lagi prediksi data dari PBB tahun 2019 menyebut bahwa Indonesia sampai pada tahun 2050 merupakan salah satu dari sembilan negara dengan pertumbuhan populasi yang signifikan (Molotoks et al., 2021).

Atas dasar itu, persoalan ketahanan pangan menjadi isu yang krusial dan kompleks serta berbasis multidimensi karena meliputi ragam aspek. Aspek ekonomi politik bagi

(Suryana, 2014) kerap menjadi “faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas” bagi pemerintah. Maka tak pelak kebijakan Pangan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) termaktub dalam **Nawacita** merupakan pedoman dan dasar bagi kerja segenap lembaga pemerintahan dalam mencapai swasembada pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani. Sang Presiden menegaskan tiga hal penting dalam kebijakannya yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan menyejahterakan petani (Saifulloh, 2021). Namun persoalannya justru terjadi krisis kedaulatan dalam penataan sistem ketahanan pangan nasional. Karena menurut (Machfoedz, 2014) pengelolaan ketahanan pangan di negara ini cenderung nir-kedaulatan. Hal itu terlihat bagaimana kebijakan impor pangan dan keamanan pasokan pangan di dalam negeri masih terpengaruh pada aktor-aktor dan institusi luar negeri.

Atas dasar itu maka upaya keras yang perlu didorong ialah laku politik partai-partai dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Partai politik memiliki tanggung jawab sosial sebagai organisasi yang ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tentang pangan yang di berbagai daerah masih menunjukkan potensi kerawanan pangan. Meskipun Indonesia masih tergolong negara yang memiliki potensi lebih dalam ketersediaan lahan produktif pertanian dan perkebunan. Kerawanan pangan, ketersediaan pangan, sampai dengan akses terhadap pangan masih menjadi permasalahan yang muncul di negara ini. Sebagai salah satu infrastruktur politik, partai politik sebetulnya punya peranan yang besar dalam memengaruhi arah kebijakan pemerintahan atau negara dan pengimplementasian program-program nyata dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Partai politik juga bisa berperan aktif secara langsung dengan melaksanakan program yang mendukung ketahanan pangan. Selain partai politik memiliki sumber daya struktural kuat dari level pusat sampai daerah, dari luar sampai dalam lingkaran pemerintah, mereka juga memiliki berbagai agenda yang sebetulnya bisa dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dan perhatian mereka terhadap permasalahan yang ada terkait pangan. Hanya saja eksistensi partai politik terkadang selalu muncul menjelang proses kontestasi politik elektoral saja.

Rayuan gombal kepada petani diobral partai jika sedang menghadapi kontestasi politik elektoral (Machfoedz, 2014). Partai menjadikan ketahanan pangan yang disesuaikan dengan ideologinya sebagai manifestasi dan program guna mendapatkan suara dalam kontestasi

electoral. Dalam kacamata politik, hal seperti ini terbiasa lumrah karena terlalu sering dipertontonkan, namun sejatinya partai politik harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk turut serta berperan dalam memecahkan permasalahan pangan yang terjadi. Peran serta aktif partai politik sebetulnya akan membuat mereka lebih mendapatkan simpati yang lebih besar ketimbang hanya aktif pada saat menjelang pemilihan umum. Kondisi ideal ini memang sulit terjadi karena benturan agenda politik dalam tubuh partai politik itu sendiri masih sering belum terselesaikan secara internal.

Atas dasar itu maka riset bertujuan menilik diskursus kedaulatan pangan dalam pengorganisasian partai politik. Riset ini penting untuk dilakukan karena melihat Indonesia dengan segala potensi pangan yang dimiliki, namun masih banyak permasalahan pangan yang dihadapi. Permasalahan pangan memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, namun perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang punya peran strategis terhadap masyarakat salah satunya adalah partai politik. Maka riset ini akan memotret bagaimana peran partai politik dalam mendukung upaya negara untuk mencapai ketahanan dan bahkan kedaulatan pangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian studi kasus menurut Stake (1995) dalam (Creswell, 2013) dinilai memiliki pendekatan naturalistik dan sensitif terhadap kompleksitas dan interaksi dalam konteks tertentu. Studi kasus yang disajikan dalam artikel ini berasal dari studi kualitatif tentang diskursus kedaulatan pangan pada organisasi partai-partai politik di Indonesia. Atas dasar itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Digunakannya pendekatan studi kasus dengan jenis deskriptif merupakan strategi untuk memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci kelaziman suatu fenomena (Yin, 2018).

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ialah bersandar pada dokumen tertulis seperti dokumen resmi partai yakni AD/ART, Visi Misi, dan dokumen lain yang relevan dengan topik bahasan. Cara itu kami kerjakan guna menelusuri bagaimana pewacanaan pangan yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia. Adapun dalam menyajikan argumen dan bukti-bukti (Ambardi, 2009), kami memilih memakai gaya naratif-deskriptif.

Hal demikian dikarenakan objek studi ini adalah pengejawantahan partai-partai politik dalam pewacanaan kedaulatan pangan melalui dokumen resminya agar lebih mudah digambarkan.

## KERANGKA TEORI

### *Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan*

Pangan merupakan produk pertanian yang penting dan krusial. Dari dahulu, orang-orang telah mempraktikkan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Kuiper & Cui, 2021; Purwaningsih, 2008; Sastrosupadi, 2019). Eksistensi sebuah negara sangat bergantung pada pangan, maka bagi negara dengan kerawanan pangan disinyalir akan mengalami krisis. Seperti yang tercatat dalam sejarah yakni negara Uni Soviet. Negara besar tersebut bubar disebabkan embargo pangan oleh Amerika Serikat (Saifulloh, 2021).

Adapun istilah Ketahanan Pangan didefinisikan pada 1996 oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) sebagai berikut: “*Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*” (Molotoks et al., 2021; Suharyanto, 2011). Pemaknaan penting atas perwujudan ketahanan pangan ternyata tidak hanya pada ketersediaannya semata, melainkan juga pada aksesibilitas masyarakat terhadap makanan, nutrisi atau gizi dari kandungannya yang menyehatkan tubuh agar mampu menopang segala aktivitas.

Selanjutnya mari kita membincang secara diskursif terminologi Kedaulatan Pangan yang merupakan antitesis terhadap wacana ketahanan pangan FAO. Artinya diskursus kedaulatan pangan merupakan wacana tandingan terhadap ketahanan pangan. Kemunculan gagasan kedaulatan pangan ditengarai karena konsep yang disajikan oleh FAO tentang ketahanan pangan yang terlalu “*teknis dan melupakan persoalan proses pemenuhan pangan... ketahanan pangan tidak terlalu merisaukan bagaimana pangan diperoleh dan terjangkau*” (Machfoedz, 2014). Atas dasar itu *La via Campesina* seperti yang dikutip oleh Richard Lee (2007) dalam (Machfoedz, 2014) memformulasikan kedaulatan pangan sebagai landasan ketahanan pangan dengan perspektif politik paripurna berikut ini:

*“Food sovereignty is the right of each nation to maintain and develop its own capacity to produce its basic foods respecting cultural and productive diversity. We have the right to produce our own food in our own territory. Food sovereignty is a precondition to genuine food security. Food Sovereignty*

*is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to deine their own food and agriculture systems.”*

Isu Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk kepentingan petani juga ditekankan dalam UU Pangan. Dari segi hukum, undang-undang ini dinilai oleh DPR tidak cukup untuk melindungi kepentingan petani. Oleh karena itu, selanjutnya disusun RUU dan disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tanpa mengabaikan fakta bahwa masih terdapat kontroversi terkait substansi, dapat dikatakan bahwa kedua undang-undang ini lebih dari cukup untuk membentuk perlindungan dan kepentingan petani secara legal formal. Persoalannya, menurut (Machfoedz, 2014; Saifulloh, 2021) ketentuan kebijakan perundangan tersebut kurang terimplementasi dengan baik dan di berbagai daerah belum terealisasi terutama dalam bidang ketersediaan dan akseptabilitas pangan. Sementara itu, realisasinya merupakan kebutuhan petani, sekaligus perlindungan hukum formal baginya. Potensi perlindungan hak untuk menjanjikan rancangan hukum dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kedaulatan yang disyaratkan tentu memerlukan perhatian publik yang lebih cermat. Kedaulatan pangan tidak hanya harus relevan dengan pembangunan sistem pangan, tetapi juga berpotensi mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

UU No. 18 Tahun 2012 menerangkan pengertian atas Ketahanan Pangan dan juga Kedaulatan Pangan sebagai berikut:

“**Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”  
“**Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal; Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.”

Ditinjau dari aspek swasembada dan ketahanan pangan saja, maka untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak sedikit tantangannya, baik tantangan teknis dan non teknis. Tantangan non teknis lebih berat dibandingkan tantangan teknis karena melibatkan sosial ekonomi masyarakat, terutama untuk petani. Menurut Dillon (Kompas, 2014) dalam kedaulatan pangan, negara harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan segala alat atau kebijakan yang dimiliki bangsa dalam kondisi apa pun. Ujung dari kedaulatan pangan adalah keberpihakan kepada petani (Sastrosupadi, 2019) dan rakyat secara keseluruhan.

### ***Diskursus Partai Politik***

Partai politik merupakan himpunan masyarakat yang bersatu atas kesamaan kepentingan. John Kenneth White dalam (Richard S. Katz and William Crotty, 2006) partai adalah sebuah tim yang berupaya mengontrol aparatur pemerintahan melalui pemilihan. Bersatu menjalani kegiatan bersama perjuangan kepentingan dan promosi mereka, dengan prinsip tertentu yang telah disetujui. Penting untuk sebuah partai memiliki ideologi, sebab bagaimanapun ide kebijakan berasal, mereka adalah terkait dengan agenda politik oleh partai politik dalam pemilihan. Ketika negara menghadapi keputusan yang sulit, partai politik dapat mengartikulasikan dan berdebat solusi alternatif, dan pemilu kemudian dapat mengarah pada keputusan masyarakat. Partai politik biasanya membawa ide-ide ini dalam kontestasi politik elektoral. Bagi sebagian besar partai politik, ideologi dan ide diwujudkan dalam platform partai (Visi Misi, AD/ART), manifesto, dan program.

Partai politik memiliki sisi keunikan masing-masing sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, semisal ideologi politik pada partai. Ideologi politik Francesca Vassallo dan Clyde Wilcox dalam (Richard S. Katz and William Crotty, 2006) merupakan sarana dalam mendapatkan suara elektoral, ide berbentuk ideologi ini dipergunakan untuk memaksimalkan suara mereka dalam pemilihan umum. Akan tetapi ideologi kerap kali dipergunakan partai hanya untuk mendapatkan dan mempertahankan suara. Hal ini dilakukan demi kepentingan eksistensi partai tidak lain adalah untuk kontinuitas mereka semata. Maka dari itu (Richard S. Katz and William Crotty, 2006) menegaskan bahwa "*Parties have always been in a process of change.*" Artinya partai kerap mengubah haluan dan bertransformasi menyesuaikan peta dari mayoritas logika pemilih, kondisi kekinian, dan kehendak elit partai.

## PEMBAHASAN

### *Menilik Visi Misi dan AD/ART Partai-partai terkait Kedaulatan Pangan*

Pada konteks peningkatan taraf bangsa Indonesia sebagai negara demokratis, seyogyanya partai politik turut berperan aktif melalui fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat (Sigit Pamungkas, 2011; Hutabarat, 2017). Partai politik diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat ke dalam alternatif kebijakan atau program-program pemerintah. Undang-Undang RI Pasal 9 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perlu mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sudah seyogyanya partai politik memiliki perhatian khusus untuk mencapai kedaulatan pangan, maka perlu dibuktikan kesungguhannya melalui AD/ART yang memuat fokus persoalan pangan bangsa Indonesia, meliputi kepentingan kelompok konsumen (masyarakat luas) maupun kelompok produsen seperti petani, nelayan dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk membuktikan konsistensi partai politik dalam menciptakan kedaulatan pangan, sesuai dengan *image* yang telah terbangun di hadapan publik. Tim penulis coba menelaah sejumlah naskah AD/ART partai-partai politik di Indonesia. Adapun partai-partai yang kami kaji ialah semua partai politik di level nasional peserta pemilihan umum tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil telaah kami, dari 16 partai politik di Indonesia terdapat sebanyak 12 partai politik tidak memuat secara tegas diksi atau topik mengenai pangan dan sejenisnya dalam AD/ART-nya. Dua belas (12) partai itu ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Berkarya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Demokrat. Tim peneliti dalam melakukan penelusuran ini menggunakan cara meng-klik "*control + f*" pada *softfile* AD/ART seluruh partai politik dan benar-benar mengecek secara teliti dengan membaca AD/ART mereka. Dalam metode "*control + f*" kami memakai sejumlah kata kunci seperti: kedaulatan pangan, ketahanan pangan, petani, nelayan, sandang, pertanian, perikanan, stabilitas harga/stabilitas ekonomi, dan akses pangan.

Adapun empat (4) partai politik di Indonesia yang menyantumkan secara tegas diksiksi soal pangan atau sejenisnya, kami sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Partai Politik Terdapat Kedaulatan Pangan dalam AD/ART

Nama Parpol/ Akronim	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART)
<p><b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>Arti, Tujuan, Fungsi, dan Tugas</b> <b>Pasal 8</b></p> <p>c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.</p>
<p><b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>Kelengkapan dan Perangkat Partai</b> <b>Pasal 63</b></p> <p>e. gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia, disingkat Gerbang Tani, untuk segmen petani dan nelayan.</p>
<p><b>Partai Nasional Demokrat (Nasdem)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>Restorasi Ekonomi dan Pembangunan</b> <b>Haluan bidang Ekonomi juga Pembangunan</b></p> <p>2. Restorasi kebijakan pangan terutama di bidang pertanian dan perikanan untuk mencapai kedaulatan. Mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat agar lebih berkualitas. Memperluas lumbung pangan dan mengembangkan komoditas pangan lokal. Mendorong pemerintah untuk membangun pertanian dan perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi guna memenuhi kebutuhan industri.</p>
<p><b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>Sasaran dan Program</b></p> <p>m. merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, olahraga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, keluarga berencana, kepanduan, penanggulangan bencana, dan bela negara.</p>

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis berdasar pada AD/ART masing-masing partai (2021)

Bersandar pada temuan data di atas, secara implisit menegaskan bahwa memang sebenarnya cita-cita untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang pangan belum menjadi salah satu fokus utama partai-partai politik di Indonesia. Dari 16 partai politik hanya terdapat 4 partai yang menandakan nilai kedaulatan pangan di AD/ART-nya. *Pertama*, PDI-P yang mencantumkan perjuangan pemenuhan kebutuhan absolut rakyat dalam bidang pangan pada “BAB III Arti, Tujuan, Fungsi, dan Tugas” di Pasal 8. *Kedua*, PKB di dalam AD/ART-nya menuliskan tentang pentingnya mendorong gerakan kebangkitan pertanian dan nelayan yang termaktub dalam “BAB VII Kelengkapan dan Perangkat Partai” di Pasal 63.

Selanjutnya *Ketiga*, Partai Nasdem memasukkan fokus bidang restorasi kebijakan pangan terutama di bidang pertanian dan perikanan pada “BAB VII Restorasi Ekonomi dan Pembangunan Haluan bidang Ekonomi juga Pembangunan.” *Keempat*, PKS membubuhkan rumusan konsepsi pertanian dan kelautan dalam “BAB II Sasaran dan Program partai.”

Sistem multi-partai ekstrem yang diterapkan di Indonesia dengan banyaknya partai secara kuantitas justru ternyata kebanyakan dari mereka belum menegaskan proyeksi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pangan. Minimnya partai politik yang memiliki kesadaran akan pentingnya kedaulatan pangan bertentangan dengan urgensi kebutuhan pangan masyarakat yang sangat besar dan krusial di tengah ancaman kerawanan pangan yang kerap menerpa beberapa daerah di Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Penggiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori (Dyantoro, 2019) mengatakan penting untuk mengutamakan kebijakan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan aktor produsen pangan demi tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia.

### ***Wacana Kedaulatan Pangan oleh Partai dan Elit Politiknya***

Diskursus kedaulatan pangan bukan isu baru bagi elit politik Indonesia, seperti yang dilakukan Harry Tanoesoedibyo (Sholehudin, 2019) pada kampanye sekaligus kegiatan bazar pangan (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Ketua Umum Partai Perindo ini mengatakan seluruh partai politik tentunya mempunyai visi membangun kedaulatan pangan, sebab ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Partai Golkar juga turut mewarnai diskursus ini dengan menekankan pada persoalan krisis pangan (investor.id, 2011) dan mendorong upaya mendukung ketahanan pangan yang harus berorientasi aksi dan bisa diimplementasikan (jpnn.com, 2021). Adapun Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) berwacana akan mengembangkan sektor pertanian khususnya pangan. Sektor ini menjadi basis penting yang harus mendapatkan dukungan agar mencapai swasembada pangan (Kharismawati, 2014).

Argumen serupa diungkapkan oleh Andi Akmal Pasluddin (Politisi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS, 2021), Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS ini menegaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah memiliki kewajiban mengelola stabilisasi persediaan pangan, akses pangan, juga sistem distribusi pangan kepada masyarakat. Secara institusional, PKS terbilang aktif dalam menyampaikan berbagai konsep dalam mendukung upaya ketahanan maupun kedaulatan pangan. Beberapa konsep yang disampaikan adalah pengoptimalan sumber daya lokal dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga di daerah rawan pangan dengan memaksimalkan keanekaragaman ekosistem pangan dan sumber daya pangan. Dengan adanya pandemi covid-19, partai ini mendorong optimalisasi aktivitas pertanian melalui agro industri. Peningkatan produksi pertanian diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan menjadi lebih tinggi.

Kemudian aktualisasi PKB atas pewacanaan pangan dengan menyajikan sebuah konsep Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia, disingkat Gerbang Tani. Implementasi dari pengorganisasiannya dijadikan sebagai badan otonom PKB. Gerbang Tani diharap mampu untuk mewujudkan **Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia**. (<https://gerbangtani.or.id/siapa-kami/>). Beberapa hal yang telah dilakukan adalah melaksanakan Workshop Petani Milenial sebagai respon atas menurunnya jumlah petani karena regenerasi petani muda yang kurang berkembang yang disebabkan oleh berbagai faktor. Gerbang Tani juga aktif menyuarakan aspirasi dari nelayan seperti penolakan atas terbitnya terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 85 tahun 2021 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perikanan. DPN Gerbang Tani menjelaskan bahwa PP 85/2021 akan lebih memberatkan dan menekan para nelayan. Hal ini disebabkan kenaikan tarif dari PNBP sektor perikanan mengalami kenaikan sampai dengan 600%.

Sedangkan Partai GERINDRA coba menggodok konsep ketahanan dan kemandirian pangan serta energi untuk ditawarkan kepada Presiden agar masuk dalam kebijakan prioritas pemerintahan (Pontas.id, 2019). Lalu Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau pemerintah tidak menangani ancaman ketahanan pangan secara acak dan sporadis. Atas dasar ini, partai tersebut berupaya memperjuangkan dana cadangan pangan mencapai yang besar pada APBN (vivanews, 2010) sehingga menurut partai ini masalah pangan harus menjadi agenda politik.

Adapun Partai Demokrat mendorong pembentukan Badan Otoritas Pangan. Badan tersebut diproyeksi tak hanya mengurus soal makanan pokok, tapi juga pembudidayaan ikan, hasil-hasil nelayan, dan pelaku usaha sebagai produsen pangan (Beritasatu.com, 2012).

Selanjutnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menekankan juga kepada pemerintah agar tidak hanya mendorong ketahanan pangan, tapi juga kedaulatan pangan. Ia mengatakan tidak setuju dengan istilah ketahanan pangan (Nurita, 2021; Prireza, 2017) dengan mengucap bahwa “... yang harus dilakukan sebenarnya adalah kedaulatan pangan, bukan mempertahankan pangan.” Menurutnya, ketahanan pangan hanya berorientasi pada kesediaan pangan belaka, tanpa peduli asal muasalnya. Seperti halnya kesediaan pangan berbasis pada kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal tersebut justru akan berdampak buruk pada nasib petani dan pelaku industri pangan dalam negeri. Sedangkan permasalahan kedaulatan pangan adalah soal keberlangsungan hidup suatu bangsa, dari kedaulatan petani, air, tanah, dan energi. Topik kedaulatan pangan yang disampaikan Mega senada dengan tema Rakornas PDI-P tahun 2017, yaitu “Berdikari untuk Indonesia Raya.”

Diskursus kedaulatan pangan di tubuh partai-partai ataupun yang disuarakan oleh para elit politiknya seperti paparan di atas cukup menarik untuk didalami. Namun apakah keseriusan partai hanya terletak pada retorika semata ataukah melanjutkan wacana-wacana tersebut dalam langkah kongkret seperti membuat kebijakan secara internal partai dan bahkan mendorong perwakilannya di lembaga pemerintah (baik eksekutif ataupun legislatif) guna menelurkan kebijakan dan peraturan tentang aplikasi kedaulatan pangan. Sayangnya tidak sedikit elit partai politik menurut (Purwaatmoko, 2015) menggelontorkan isu-isu publik hanya sekadar mendapatkan suara konstituen sebanyak-banyaknya.

## PENUTUP

Hasil penelusuran dan analisa menggambarkan bahwa beberapa partai politik seperti PDI-P, Nasdem, PKB, dan PKS telah mencantumkan program pangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Pengimplementasian AD/ART telah dijabarkan dalam berbagai program-program partai yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Namun masih perlu peningkatan upaya yang lebih massif dan terstruktur ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan sehingga Partai Politik bisa lebih eksis menyelenggarakan program di tempat yang membutuhkan bantuan berkaitan dengan pangan. Meski pewacanaan mengenai ketahanan maupun kedaulatan pangan dimunculkan oleh elit-

elit partai namun basis kejelasan antara korelasi kebijakan ataupun program partai sepertinya tidak berbanding dengan hakekat pengejawantahannya secara tegas di AD/ART partai. Artinya dasar elit partai dalam menyuarakan cita-cita kedaulatan pangan terbilang dangkal seperti “tong kosong nyaring bunyinya” yang artinya bersuara tanpa ada isinya. Tanpa ada pegangan dasar dari AD/ART maupun visi-misi partai.

## REFERENSI

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arbar, T. F. (2021). Miris! Separuh Orang Lapar di Dunia Warga Asia, bukan Afrika. *Cnbcindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211017073618-4-284449/miris-separuh-orang-lapar-di-dunia-warga-asia-bukan-afrika>
- Arndt, C., Davies, R., Gabriel, S., Harris, L., Makrelov, K., Robinson, S., ... Anderson, L. (2020). Covid-19 lockdowns, income distribution, and food security: An analysis for South Africa. *Global Food Security*, 26(July), 100410. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100410>
- Beritasatu.com. (2012). Demokrat Dorong Pembentukan Badan Otoritas Pangan. <https://www.beritasatu.com/>. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/34801/demokrat-dorong-pembentukan-badan-otoritas-pangan>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third Edit). California: SAGE Publication.
- Dyantoro. (2019). Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Butuh Keputusan Politik yang Kuat.
- Farcas, A. C., Galanakis, C. M., Socaciu, C., Pop, O. L., Tibulca, D., Paucean, A., ... Socaci, S. A. (2021). Food security during the pandemic and the importance of the bioeconomy in the new era. *Sustainability (Switzerland)*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su13010150>
- Fraksi PKS. (2021). Politisi PKS Tegas Minta Badan Pangan Nasional untuk Segera Fokus Bekerja.

- Ghaedi, M. (2021). Angka Kelaparan Dunia Meningkatkan Tajam, Pandemi-Perubahan Iklim Jadi Pemicunya. *Dw.Com*. Retrieved from <https://www.dw.com/id/angka-kelaparan-dunia-meningkat-tajam-pandemi-perubahan-iklim-pemicunya/a-59502298>
- Hadyan, R. (2021). Indeks Ketahanan Pangan Global 2020: Posisi Indonesia Turun ke-65. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210313/12/1367047/indeks-ketahanan-pangan-global-2020-posisi-indonesia-turun-ke-65>
- Harahap, S. W. (2021). Angka Kelaparan di Dunia Meningkatkan Tajam. *Tagar.Id*. Retrieved from <https://www.tagar.id/angka-kelaparan-di-dunia-meningkat-tajam>
- Hutabarat, R. (2017). Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat Dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 314. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1521>
- investor.id. (2011). *Golkar Peringatkan Pemerintah Soal Krisis Pangan*. Retrieved from <https://investor.id/national/5823/golkar-peringatkan-pemerintah-soal-krisis-pangan>
- jpnn.com. (2021). *Airlangga: Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Harus Berorientasi Aksi dan Bisa Diimplementasikan*. Retrieved from <https://www.jpnn.com/news/airlangga-upaya-mendukung-ketahanan-pangan-harus-berorientasi-aksi-dan-bisa-diimplementasikan>
- Kharismawati, M. (2014). PPP: Janjikan kesejahteraan bagi petani. <https://nasional.kontan.co.id/>. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ppp-janjikan-kesejahteraan-bagi-para-petani>
- Kuiper, M., & Cui, H. D. (2021). Using food loss reduction to reach food security and environmental objectives – A search for promising leverage points. *Food Policy*, 98(June 2020), 101915. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101915>
- Lestari, R. (2021). Kembali ke “Jalur Perang” Lawan Kelaparan Dunia. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210822/620/1432471/kembali-ke-jalur-perang-lawan-kelaparan-dunia>
- Machfoedz, M. M. (2014). Kedaulatan Pangan: Antara Legalitas Proteksi Dan Legalisasi Importasi. *Jurnal Landreform*, 1.
- Mishra, K., & Rampal, J. (2020). The COVID-19 pandemic and food insecurity: A viewpoint on India. *World Development*, 135, 105068. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105068>

- Molotoks, A., Smith, P., & Dawson, T. P. (2021). Impacts of land use, population, and climate change on global food security. *Food and Energy Security*, 10(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.1002/fes3.261>
- Nchanji, E. B., & Lutomia, C. K. (2021). Regional impact of COVID-19 on the production and food security of common bean smallholder farmers in Sub-Saharan Africa: Implication for SDG's. *Global Food Security*, 29(January), 100524.  
<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100524>
- Nurita, D. (2021). Megawati Dorong Adanya Kebijakan Berbasis Kedaulatan Pangan Agar Tak Terus Impor. *Tempo.Co*. Retrieved from  
<https://nasional.tempo.co/read/1445557/megawati-dorong-adanya-kebijakan-berbasis-kedaulatan-pangan-agar-tak-terus-impor/full&view=ok>
- Pontas.id. (2019). Gerindra Akan Tawarkan Konsep Ketahanan Pangan ke Jokowi. *Https://Pontas.Id/*. Retrieved from <https://pontas.id/2019/07/22/gerindra-akan-tawarkan-konsep-ketahanan-pangan-ke-jokowi/>
- Prireza, A. (2017). Megawati: Harusnya Kedaulatan Pangan, Bukan Ketahanan. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1042819/megawati-harusnya-kedaulatan-pangan-bukan-ketahanan/full&view=ok>
- Purwaatmoko, S. (2015). Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY). *Jurnal INSIGNIA*, 2(1), 54–76.
- Purwaningsih, Y. e. (2008). Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 No. 1, 1–27.
- Richard S. Katz and William Crotty. (2006). *Party Politics*. AGE Publications.
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>
- Sastrosupadi, A. (2019). KETAHANAN PANGAN DAN BEBERAPA ASPEKNYA. *Buana Sains*, 19(2), 47–52.
- Sholehudin. (2019). Partai Punya Peran Penting Wujudkan Kedaulatan Pangan.
- Sigit Pamungkas. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktik Di Indonesia*. Institute Fir Democracy and welfarism.
- Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.

- Retrieved from <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Suryana, A. (2014). MENUJU KETAHANAN PANGAN INDONESIA BERKELANJUTAN 2025 : TANTANGAN DAN PENANGANANNYA Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges and Its Responses. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135.
- Tempo.co. (2021a). Angka Kelaparan dan Kekurangan Gizi di Dunia Naik 10 Persen Akibat Corona. *Dunia.Tempo.Co*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1482775/angka-kelaparan-dan-kekurangan-gizi-di-dunia-naik-10-persen-akibat-corona/full&view=ok>
- Tempo.co. (2021b). *Angka Kelaparan Dunia Meningkatkan Tajam, Pandemi-Perubahan Iklim Jadi Pemicunya*. Retrieved from <https://www.tempo.co/dw/5877/angka-kelaparan-dunia-meningkat-tajam-pandemi-perubahan-iklim-jadi-pemicunya>
- vivanews. (2010). PAN: Rp6 Triliun untuk Ketahanan Pangan. *Viva.ca.Id*. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/172867-pan-rp-6-triliun-untuk-ketahanan-pangan>
- Yin, R. . (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In *Case Study Research and Applications"Design and Methods* (Sixth Edit).
- Zurayk, R. (2020). Pandemic and Food Security: A View from the Global South. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 9(3), 1–5.  
<https://doi.org/10.5304/jafscd.2020.093.014>